

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

**Disusun oleh :
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, hanya karena berkah, rahmat, serta hidayahNya-lah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2018 berhasil diselesaikan.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban bagi setiap perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan komunikasi informasi dan persandian berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2017-2022.

Saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu kebutuhan dan keharusan yang tidak bisa dihindarkan untuk dilaksanakan, dalam kondisi masyarakat Kota Yogyakarta yang kritis dan dinamis, setiap perangkat daerah harus bisa menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan pencapaian sesuai target yang direncanakan. LKIP 2018 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada tahun 2018.

Akhirnya laporan evaluasi kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin dalam penyajiannya namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah dalam pencapaian target kinerja, dan hal tersebut akan senantiasa diupayakan lebih baik lagi pencapaiannya di tahun-tahun mendatang.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP ini, semoga amal baiknya diterima Allah SWT, dan semoga dokumen LKIP ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika

Dan Persandian Kota Yogyakarta



Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 196907231996031005

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2018 ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan komunikasi, informasi dan persandian di Kota Yogyakarta serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

LKIP ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan, rencana pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasar (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2017 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi,

informatika, persandian dan statistik.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a) UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- j) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
- k) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022

- l) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2017 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta
- m) Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 adalah :

- a) Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya
- b) Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD
- c) Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya
- d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di komunikasi, informasi, persandian dan statistik
- e) Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja SKPD pada periode kerja selanjutnya
- f) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya
- g) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2017 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik

Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Struktur Organisasi

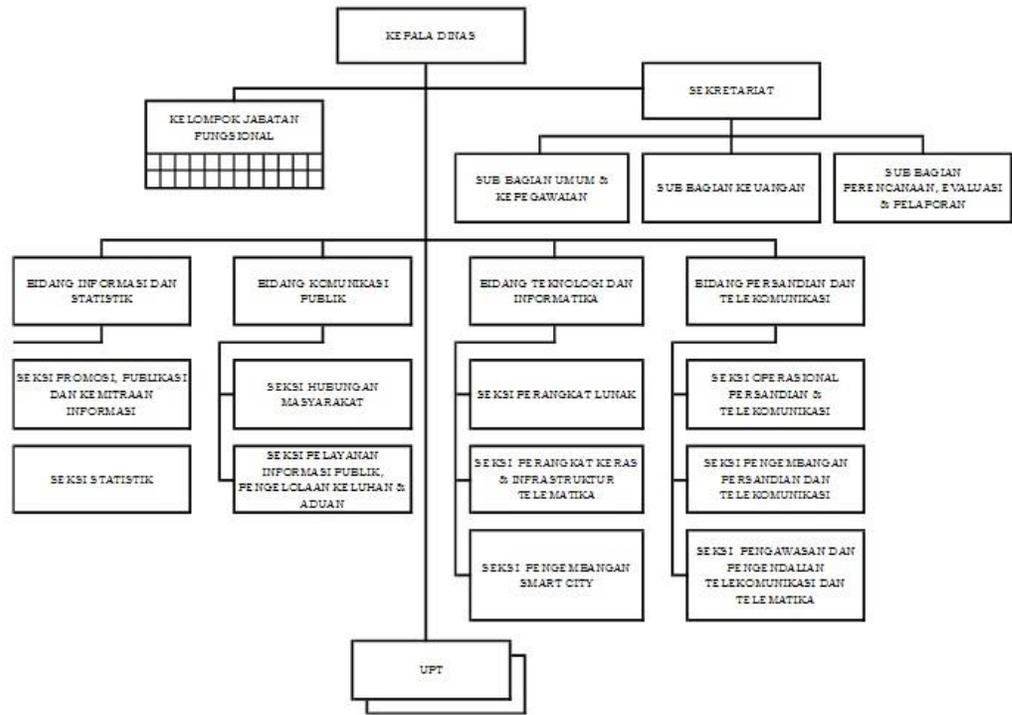
- a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Kantor sebagaimana dimaksud butir (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Informasi dan Statistik, terdiri dari
 - 1) Seksi Promosi, Publikasi, dan Kemitraan Informasi
 - 2) Seksi Statistik
- d. Bidang Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Hubungan Masyarakat
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi Publik, pengelolaan keluhan dan aduan
- e. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perangkat Lunak
 - 2) Seksi Perangkat Keras dan Infrastruktur Telematika
 - 3) Seksi Pengembangan Smart City
- f. Bidang Persandian dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasional Persandian Telekomunikasi
 - 2) Seksi Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi dan Telematika
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Secara skematis untuk Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dituangkan dalam skema sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



1.5 Lingkungan Strategis yang berpengaruh.

1.5.1 Kondisi Geografis dan Kependudukan Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan merupakan kota yang “terbuka”. Banyak penduduk datang ke Kota Yogyakarta baik sebagai penduduk tetap atau tinggal sementara. Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 32,5 km² terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan, meliputi 616 RW dan 2.535 RT. Kondisi sosial masyarakat yang beragam juga menjadikan lingkungan strategis yang berpengaruh dalam penyelenggaraan urusan komunikasi, informasi dan persandian serta statistik di Kota Yogyakarta.

1.5.2 Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sampai dengan Bulan Desember 2018 adalah 54 orang, terdiri dari : 43 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Tenaga Bantuan (Naban) dan 8 orang tenaga teknis

Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan Eselon :

Eselon	Jumlah
II	0
III	5
IV	12
Non Eselon	45

Perbandingan jumlah karyawan berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	3
III	36
II	4
I	0

Perbandingan jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	0
S2	9
S1	17
DIV	1
D3	7
SMA	9
SLTP	1

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Tingkat Pendidikan paling tinggi adalah S2 dengan jumlah pegawai 9 orang, paling rendah adalah lulusan SLTP sejumlah 1 orang, sedangkan jumlah lulusan S1 sejumlah 17 orang.

1.5.3 Perlengkapan

Asset perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berupa sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5.3**Daftar Jenis Barang Pendukung Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta
Per 31 Desember 2018**

No	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	Kendaraan Roda Empat	4
2.	Kendaraan Roda Dua	21
3.	Ruang Rapat	3
4.	Komputer	110
5.	Printer	31
6.	Notebook	33
7.	Telepon	427
8.	Mesin Faximile	11
9.	Meja Kerja	145
10.	Kursi Kerja	124
11.	Meja Rapat	14
12.	Kursi Rapat	130
13.	Almari	27
14.	Filing Kabinet	28
15.	Laptop	2
16.	AC	26
17.	Acces Point	62
18.	Swicth	262
19.	UPS	160
20.	Server	59
21.	Tiang FO	669
22.	CCTV	159
23.	Buku Perpustakaan	289

1.6 Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2018 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah tahun 2018 sebesar Rp 24.671.789.901,- Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 2.876.689.431,- Belanja

langsung Rp 21.795.097.470,- Perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dan belanja langsung 88.34 % dibanding 11.66 %

Tabel 1.6
Jumlah Anggaran Belanja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2018	Anggaran Tahun 2017
Belanja Tidak langsung	Rp 2.876.689.431	Rp 2.670.725.775
Belanja Langsung	Rp 21.795.097.470	Rp 18.168.733.090

Komposisi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Rincian penggunaan alokasi belanja Tidak langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2018 sebagai berikut :

Rincian	Jumlah Anggaran 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran 2017 (Rp)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.126.025.685	1.993.176.133
Tunjangan Keluarga	201.278.811	171.075.677
Tunjangan Jabatan Struktural	148.946.000	129.921.500
Tunjangan Jabatan Fungsional	89.049.900	43.400.000
Tunjangan Fungsional Umum	50.225.000	83.481.125
Tunjangan Beras	112.236.516	102.438.090
Tunjangan PPh	5.207.842	18.558.840
Pembulatan Gaji	30.565	26.654
Iuran Asuransi Kesehatan	59.844.973	570.147.546
Iuran jaminan Kematian	17.970.592	0
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.373.547	12.220.210
Tunjangan Pengamanan Persandian	61.500.000	59.280.000
Jumlah	2.876.689.431	2.670.725.775

Komposisi Anggaran Belanja Langsung

Rincian penggunaan alokasi belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Anggaran 2018 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.264.711.176	866.227.020
1.1	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat dan Konsultasi	455.802.000	241.960.000
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan dan Perlengkapan Kantor	719.916.776	466.3923100
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	88.992.400	157.874.920
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	220.401.871	242.669.400
2.1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Bangunan Kantor	85.000.000	114.781.400
2.2	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	135.401.871	124.888.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	54.000.000	48.500.000
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	54.000.000	48.500.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	2.220.000	71.728.000
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	2.220.000	71.728.000
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	15.511.497.487	13.044.563.264
5.1	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	1.673.211.192	797.564.600
5.2	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	13.582.754.122	12.042.450.664
5.3	Pengembangan Smart City	255.532.173	204.548.000
6	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	1.731.944.206	1.514.821.414
6.1	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	1.731.944.206	1.514.821.414
7	Program Peningkatan Komunikasi Publik	1.478.546.030	1.327.447.242
7.1	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	1.205.051.824	872.362.828

7.1	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	273.494.206	455.084.414
8	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	157.281.100	207.922.300
8.1	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	157.281.100	207.922.300
9	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	1.374.495.600	844.854.450
9.1	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	717.828.000	363.360.000
9.2	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	569.155.500	410.909.450
9.3	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	87.512.100	70.585.000
	Jumlah	21.795.097.470	18.168.733.090

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini merupakan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian selama Tahun 2018 yang dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2018 sehingga tercermin tingkat keberhasilan organisasi tahun 2018.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Lingkungan Strategis yang berpengaruh
- 1.6. Anggaran
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIK

2.1.1 Visi

2.1.2 Misi

2.1.3 Tujuan

2.1.4. Sasaran

2.1. 5. Strategi Pencapaian

2.1. 6. Kebijakan

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Capaian Kinerja Indikator Utama

3.3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

3.4 Realisasi Anggaran dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIK

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor - faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor- faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat visi , misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan stratejik tingkat SKPD berupa dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan stratejik tingkat kota berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

2.1.1 Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi SKPD merupakan penjabaran sekaligus implementasi visi dan misi Kota Yogyakarta. Adapun Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 adalah :

“ Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan “

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta 2017-2022, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

- 3) Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- 5) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- 6) Membangun sarana prasarana publik dan pemukiman
- 7) Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke tujuh yaitu “ Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih “.

Dengan melihat hasil analisis internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2017 tentang Fungsi, Rincian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, maka Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah :

Visi

**“TERCIPTANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK MELALUI
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
PUBLIK YANG HANDAL MENUJU YOGYAKARTA SMART CITY”**

2.1.2 Misi

Dalam upaya mencapai Visi yang diemban maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan sebaran layanan deseminasi informasi melalui kemitraan dengan penyelenggara media dan mengikuti perkembangan teknologi informasi
2. Memberdayakan potensi komunikasi di masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan lembaga komunikasi dan informatika
3. Mendukung proses kerja internal Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pengembangan aplikasi dan sistem informasi manajemen yang handal, update dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Membangun kualitas jaringan teknologi informasi yang mandiri, terintegrasi dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap pengembangan smart city di Kota Yogyakarta
5. Menciptakan sistem kerja berbasis teknologi informasi yang handal dan terjamin keamanannya.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatnya layanan Informasi Publik
2. Meningkatnya Keamanan Informasi

2.1.4 Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sasaran merupakan (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam upaya menuju tercapainya visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian , maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2017-2022 yaitu:

1. Layanan Informasi Publik Meningkat
2. Keamanan Informasi Meningkat

Guna mengukur Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta target-targetnya , kami sajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%) PADA TAHUN KE-					
			AWAL	AKHIR			1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	23.56	47.92	Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	61.98	67.24	72.21	77.18	82.15	86.93
2	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Pengamanan Informasi	40.70	79.40	Keamanan Informasi Meningkat	Indeks Pengamanan Informasi	75.70	78.40	81.40	84.40	87.10	92.80

2.1.5 Strategi

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah :

1. Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik
2. Peningkatan komunikasi publik
3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika
4. Peningkatan pelayanan persandian

2.1.6 Kebijakan

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan, yang meliputi :

1. Meningkatkan pengelolaan media informasi pemerintah
2. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah melalui berbagai media
3. Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam penerbitan buku statistik
4. Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi
5. Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat

6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik
7. Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government
8. Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur
9. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung e-government
10. Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
11. Meningkatkan Pengamanan Sinyal Frekuensi
12. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.1.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan			
Misi 7 : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Layanan Informasi Publik Meningkatkan Keamanan Informasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Statistik	Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah
			Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Melalui Berbagai Media
			Meningkatkan Kerjasama dengan BPS dalam penerbitan Buku Statistik
		Peningkatan Komunikasi Publik	Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi
			Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat

		Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik
			Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government
			Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur
			Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung e-government
	Keamanan Informasi	Peningkatan pelayanan persandian	Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
			Meningkatkan Pengamanan Sinyal Frekuensi
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

Program yang diakomodir dalam Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta berjumlah 8 (delapan) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran
1.1.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan Kantor
1.3.	Penyediaan Jasa pengelola Pelayanan Keuangan
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
2.1.	Penyediaan Jasa pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Laporan Kinerja OPD
5	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
5.1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Data Statistik
	Kegiatan Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi
6	Program Peningkatan Komunikasi Publik
6.1	Kegiatan Pelayanan Kehumasan dan Informasi
6.2	Kegiatan Pengelolaan Keluhan dan Aduan
7	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika
7.1	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi
	Pengelolaan Perangkat Keras dan jaringan Teknologi Infomatika
	Pengembangan Smart City
8	Program Peningkatan Pelayanan Persandian
8.1	Kegiatan Operasional Persandian
8.2	Kegiatan Pengembangan Persandian
8.3	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi

2.2 RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai

dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam tahun 2018 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menetapkan rencana kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Rencana Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	67.24
2	Keamanan Informasi Meningkat	Indeks Pengamanan Informasi	78.40

Selanjutnya sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka rencana kinerja tahunan ditetapkan sebagai penetapan SKPD dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Penetapan Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Layanan Komunikasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	67.24%	- Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Rp 1.731.944.206

				Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Rp 157.281.100
				Program Peningkatan Komunikasi Publik	Rp 1.478.546.030
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	Rp 15.511.497.487
2	Keamanan Informasi Meningkat	Indeks Keamanan Informasi	75.70%	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	Rp 1.374.495.600

Tabel 2.2.3

**Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9	(10)
1.	Indeks Layanan Informasi Publik	61.98	61.98	67.24	72.21	77.18	82.15	86.93	86.93%
	Prosentase pemanfaatan data untuk pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat	94	94	95	95.50	96	96.50	97	97

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9	(10)
	dalam tempo maksimal 2x24 jam								
	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	19.93	19.93	30.43	40.93	51.43	61.93	71.80	71.80
	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	57.32	57.32	63.69	69.43	75.46	80.89	86.62	86.62
2	Indeks Pengamanan Informasi	75.70	75.70	78.40	81.40	84.40	87.10	92.80	92.80
	Persentase pengamanan informasi	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	19	19	28	38	48	57	76	76

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan jawaban dan penjelasan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra SKPD.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Oleh karena itu salah satu cara untuk mengukur Keberhasilan SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan mengukur capaian kinerja menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk laporan kinerja kami, berikut merupakan rekapitulasi realisasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2018. Kami sajikan pula capaian tahun 2017 sebagai pembandingan capaian yang telah diraih .

No	Nama Indikator	Target	Rumus Pengukuran	Perhitungan Tahun 2017	Hasil 2018	Hasil 2017
	Indeks Layanan Informasi Publik	67.24	20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	$(20\% \cdot 80 + 20\% \cdot 93.76 + 60\% \cdot ((32 + 63.69) / 2)) \cdot 100$	63.45	62.38
	Indeks Pengamanan Informasi	78.40	70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan	$=((70\% \cdot 101.7) + (30\% \cdot 26.90)) \cdot 100$	79.26	75.70

Kami berikan penjelasan hasil pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2018 sebagaimana tabel diatas adalah 63.45%, lebih kecil dari target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja yakni 67.24% sehingga tingkat pencapaiannya 94.36%. Angka pencapaian kinerja Indeks Layanan Informasi Publik 63,45% ini didapatkan dari penjumlahan prosentase masing-masing capaian program yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Untuk indikator sasaran yang pertama yakni Indeks layanan Informasi publik dihitung dari perhitungan 20% angka realisasi pemanfaatan data ditambah 20% angka realisasi prosentase aduan, pertanyaan, usul, saran dan informasi yang direspon serta 60% angka realisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika.

Untuk indikator kedua yakni Indeks Pengamanan Informasi dihitung dari 70% kinerja pengamanan informasi dan 30% capaian jumlah

perangkat daerah yang telah melaksanakan prosedur pengamanan informasi.

Dilihat dari target 67.24% dan pencapaian 63.45% pada indikator kinerja Indeks Layanan Informasi Publik maka prosentase pencapaiannya adalah 94.36 %, pencapaian sebesar 94.36% ini dikarenakan pada beberapa program pendukung angka realisasi indikator programnya tidak mencapai target sebagaimana yang ditetapkan. Program yang belum mencapai target yaitu Program Peningkatan Komunikasi publik dengan indikator Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam jumlah realisasi kurang dari presentase target yang ditetapkan yakni 95% namun realisasi yang tercapai hanya 93.36% serta Program pengelolaan informasi dan data statistik tidak mencapai target, dari target yang ditetapkan 100% hanya tercapai 80%.

Ketidakberhasilan pencapaian target tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam diatas dihitung dari jumlah pesan yang direspon sebanyak 1956 dibanding jumlah pesan yang masuk ke Unit Pelayanan Informasi dan keluhan sejumlah 2086 pesan. Pencapaian ini dimungkinkan adanya perubahan sistem pelayanan pengaduan yang awalnya melalui UPIK sekarang beralih ke sistem layanan Jogja Smart Service (JSS), dikarenakan sistem pengelolaan yang sangat berbeda antara sistem UPIK yang berbasis SMS dengan sistem JSS yang berbasis Android dimungkinkan para operator tidak lagi mengecek pesan yang masuk sistem UPIK yang lama. Kedepan akan kami evaluasi lagi sistem pengelolaan keluhan masukan usul saran ini agar lebih responsif lagi melalui sistem baru Jogja Smart Service.

Sementara itu untuk target prosentase pemanfaatan data untuk pembangunan tidak tercapai karena adanya pembatalan produksi beberapa buku statistik oleh BPS yang menjadi mitra kerjasama Seksi Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Dari target pemanfaatan 12 buku statistik hanya diproduksi 10 buku sehingga tidak mencapai 100%.

Program yang mencapai target yang ditetapkan adalah Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika. Dari dua indikator program yakni prosentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik dan Prosentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun semua bisa mencapai terget yang ditetapkan.

Indikator program prosentase pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan telematika untuk layanan publik dengan formula Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi dibanding jumlah ruang publik yang ada dan jumlah ruang publik yang terpasang CCTV dibanding jumlah ruang publik yang akan dipasang CCTV semuanya mencapai target yang ditetapkan yakni 32%, melebihi target yang ditetapkan yakni 30.43%

Sedangkan indikator prosentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun juga mencapai target yang ditetapkan yakni 63.69%, yakni terbangun 100 aplikasi yang terdiri dari 65 Sistem Informasi Manajemen dan 35 Website dari target 157 aplikasi.

Pada indikator Indeks Pengamanan Informasi jumlah target yang ditetapkan 78.40%, realisasi yang berhasil dicapai adalah 79.26 % sehingga tingkat pencapaian realisasi adalah 101%. Tercapaiannya target dari indikator Indeks Pengamanan informasi ini diperoleh dari tercapainya target dari metadata yang ditetapkan oleh Bidang Persandian yakni pada unsur jumlah kasus yang ditangani, metadata ini adalah fiterisasi, penetrasi jaringan dan pengelolaan email JKSN. Pada kasus filterisasi telah berhasil dilaksanakan 272 kali, sterilisasi 6 kali, penetrasi jaringan 7 kali dan pengeloalan email JKSN 350 kali sehingga total kasus yang ditangani adalah 634 kasus, melebihi dari target yang ditetapkan yakni 624 kasus sehingga tingkat pencapaian adalah 101%. Sedangkan pada unsur jumlah OPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dari target yang ditetapkan 15 OPD mencapai 14 OPD pada tahun 2018 ini sehingga tingkat pencapaian adalah 26.90% dari target akhir RPJMD yakni 52 OPD di tahun 2022.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran I : Layanan Informasi Publik Meningkat

Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018			Target Jangka Menengah 2022	Capaian sd 2018 terhadap jangka menengah
		Target	Realisasi	%		
Indeks Layanan Informasi Publik	62.38	67.24	63.45	94.36	86.93	72.98

Capaian Indikator Kinerja Indeks Layanan Informasi Publik diperoleh dari hasil perhitungan hasil capaian dari beberapa indikator program yang mendukung indikator kinerja indeks layanan informasi publik yaitu :

1. Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam sebagai indikator program Peningkatan Komunikasi Publik. Pada indikator ini jumlah presentase tindak lanjut aduan pertanyaan usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo 2x24 jam mencapai 93.36% dari target 95% . capaian ini diperoleh dari dari total pesan masuk selama 2018 sejumlah 1956 pesan dari 2086 pesan telah ditindaklanjuti.
2. Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik sebagai indikator Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika. Formula yang digunakan adalah $((\text{Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi} / \text{Jumlah ruang publik}) + (\text{Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV} / \text{Jumlah ruang publik})) / 2 \times 100$. Capaian dari program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika ini mencapai 105 persen karena semua target kinerja pemasangan CCTV dan pemasangan wifi di ruang publik dilaksanakan semuanya bahkan melebihi target karena adanya permintaan pemasangan Wifi oleh masyarakat dari target 99 free wifi dan CCTV terpasang 105 freewifi dan CCTV .
3. Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun sebagai indikator kedua dari Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika juga telah melaksanakan seluruh target yang ditetapkan yakni sejumlah 100 web dan aplikasi sampai dengan tahun 2018 dari target keseluruhan di akhir masa RPJMD sejumlah 157 web dan sim.
4. Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan sebagai indikator program Pengelolaan Informasi dan Statistik dengan formula $(\text{Jumlah jenis data yang dimanfaatkan} / \text{Total jenis data}) \times 100\%$ mencapai 80% target yang diharapkan yakni sejumlah 10 buku statistik telah dimanfaatkan dari target 12 buku.

Dari 20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pencapaian yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandaian adalah 63.45 %

Sasaran II : Keamanan Informasi Meningkat

Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2017			Target Jangka Menengah 2018	Capaian sd 2018 terhadap jangka menengah
		Target	Realisasi	%		
Indeks Pengamanan Informasi	75.70	78.40	79.26	101	79.26	85.40

Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengamanan diperoleh dari hasil perhitungan hasil capaian indikator program yang mendukung indikator kinerja indeks pengamanan informasi yaitu :

1. Pada indikator Indeks Pengamanan Informasi jumlah target yang ditetapkan 78.40%, realisasi yang berhasil dicapai adalah 79.26 % sehingga tingkat pencapaian realisasi adalah 101%. Tercapaiannya target dari indikator Indeks Pengamanan informasi ini diperoleh dari tercapainya target dari metadata yang ditetapkan oleh Bidang Persandian yakni pada unsur jumlah kasus yang ditangani, metadata ini adalah filterisasi, penetrasi jaringan dan pengelolaan email JKSN. Pada kasus filterisasi telah berhasil dilaksanakan 272 kali, sterilisasi 6 kali, penetrasi jaringan 7 kali dan pengelolaan email JKSN 350 kali sehingga total kasus yang ditangani adalah 634 kasus, melebihi dari target yang ditetapkan yakni 624 kasus sehingga tingkat pencapaian adalah 101%. Sedangkan pada unsur jumlah OPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dari target yang ditetapkan 15 OPD mencapai 14 OPD pada tahun 2018 ini sehingga tingkat pencapaian adalah 26.90% dari target akhir RPJMD yakni 52 OPD di tahun 2022.
2. Sedangkan pada unsur jumlah OPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dari target yang ditetapkan 15 OPD mencapai 14 OPD pada tahun 2018 ini sehingga tingkat pencapaian adalah 26.90% dari target akhir RPJMD yakni 52 OPD di tahun 2022.

Dari 70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan pencapaian kinerja sejumlah 79.26 melebihi target yang telah ditetapkan yakni 78.40%.

Secara ketugasan dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, yakni sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik pada tahun 2018 telah meluncurkan sebuah aplikasi layanan publik yang diharapkan bisa menjadi barometer akan berkembangnya sebuah SMART CITY untuk Kota Yogyakarta, aplikasi layanan publik ini adalah JOGJA SMART SERVICE (JSS)

Peluncuran JSS merupakan implementasi Sebuah konsep kota cerdas yang mengintegrasikan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dengan *Internet of Things* (IOT). Kolaborasi ini memungkinkan adanya interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien. Salah satu contohnya, masyarakat dapat mengakses informasi publik secara cepat dan akurat melalui satu pintu, bahkan hanya dengan membuka *smartphone* dari rumah.

Aplikasi Jogja Smart Service (JSS)



Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) yang bisa diakses melalui smartphone.

Demi upaya mewujudkan sebagai Smart City, Pemerintah Kota Yogyakarta menciptakan sebuah terobosan dalam sistem pelayanan yang terintegrasi. Aplikasi ini bernama Jogja Smart Service atau Jogja Siap Solusi (JSS).

Sebuah aplikasi yang siap menjadi jalur tambahan dalam memberikan pelayanan publik (dalam lingkup kota Jogja) di luar jalur konvensional.

Aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 7 Juni 2018 oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, bertepatan dengan HUT Pemerintah Kota Yogyakarta yang ke 71.

“Momen ini merupakan satu lompatan besar bagi Pemkot Yogyakarta, dalam upaya memberikan layanan secara prima kepada masyarakat Kota Yogyakarta,” kata Heroe (mengutip laman jogjakota.go.id, 11 Juni 2018.)

JSS menyatukan berbagai layanan publik dalam konsep satu pintu, berupa daftar layanan Pemerintah Kota yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan mengedepankan pelayanan mandiri, sehingga tidak perlu menggunakan berbagai media untuk aksesnya.

Inovasi ini bertujuan untuk memberikan respon secara cepat kepada masyarakat, mulai dari penyampaian keluhan, permohonan perizinan, sampai layanan kegawatdaruratan. Aplikasi ini dapat diunduh melalui *Play Store* yang terdapat pada sistem operasi *Android*.



JSS menyatukan berbagai layanan publik dalam konsep satu pintu.

aplikasi besutan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ini adalah pengembangan dari layanan pengaduan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta sejak tahun 2003 lalu. Layanan ini telah terintegrasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan selalu siap melayani serta merespon segala bentuk aduan dari masyarakat.

Hingga saat ini, terdapat lebih dari 36 fitur dalam aplikasi JSS yang terbagi menjadi 5 layanan, seperti diantaranya :

1. **Kedaruratan**

Sebuah fitur yang dirancang khusus untuk melaporkan kejadian-kejadian di seputaran Kota Jogja, yang membutuhkan penanganan segera. Seperti kecelakaan, penyelamatan jiwa, hingga kebakaran. Dalam aplikasi ini telah dilengkapi peta, sehingga lokasi kejadian dapat dengan mudah terbaca.

2. **Informasi dan Pengaduan**

Layanan ini merupakan kelanjutan dari aplikasi Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang lebih dulu dihadirkan oleh Pemkot Yogyakarta untuk menampung opini, saran, hingga aduan masyarakat. Tapi, meskipun sudah ada JSS, segala bentuk pengaduan yang disampaikan lewat UPIK masih tetap dilayani.

3. **Layanan Umum**

Fitur yang bisa dipergunakan oleh pengguna JSS untuk pelayanan yang bersifat administrasi kependudukan, seperti pelayanan online untuk pendaftaran di Kelurahan dan Kecamatan, informasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga informasi penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Yogyakarta.

4. **Layanan Data dan Informasi**

Memuat data dan informasi yang akurat seputar Kota Yogyakarta, yang kerap menjadi topik utama warga. Mulai dari lowongan pekerjaan, event wisata, sampai permasalahan yang sering diunggah di masyarakat, yaitu harga bahan pokok.

5. **Mitra Pemerintah Kota**

Dalam fitur ini, pengguna JSS bisa mendapatkan informasi secara online dari beberapa organisasi / Lembaga yang menjadi mitra Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti informasi tagihan rekening air PDAM TIRTAMARTA, layanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hingga informasi mengenai ketersediaan stok darah di PMI.

Mewujudkan Yogyakarta sebagai kota dengan konsep Smart City, tentu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Butuh sinergi dan komitmen dari para *stakeholder* untuk bahu membahu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kehadiran Jogja Smart Service (JSS) tentu menjadi sebuah angin segar menuju ke arah mimpi itu, utamanya dalam hal peningkatan efisiensi pelayanan. Walau keberadaan JSS sendiri masih membutuhkan penyempurnaan di sana sini.

Akhirnya, kesuksesan JSS ini diharapkan mampu menjadi katalisator bagi pelayanan publik yang lebih baik serta mendukung program pembangunan Kota Yogyakarta menuju *Jogja Liveable City*.

Sementara itu berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dihadapi beberapa kondisi umum saat ini, berikut merupakan daftar permasalahan dan upaya pemecahannya :

	PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika			
	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	Kerbatasan SDM (tenaga programmer)	Kerjasama dengan penyedia barang dan jasa bidang TI, Perekrutan tenaga teknis programer
	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknolgi Informasi dan Telematika	Keterbatasan personil yang mumpuni Prosedur yang belum tertata dengan baik	Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga Menyusun dan membentuk kebiasaan bekerja dengan prosedur standar
	Pengembangan Smart City	Regulasi terkait smart city yang dijadikan pedoman belum tersusun	Menggunakan dokumen kajian implementasi smart city yang sudah disusun
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik			
	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	Belum adanya dukungan dana untuk kegiatan komunikasi dari pusat	Diikutsertakan pada kegiatan yang lain
Program Peningkatan Komunikasi Publik			
	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	Keterbatasan media informasi Perkembangan isu-isu di media sosial yang tidak terbendung	Kerjasama dengan berbagai media massa Koordinasi yang lebih intensif untuk menjawab isu-isu media sosial yang berkembang
	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	Adanya OPD yang belum responsif	Koordinasi antar operator OPD yang lebih intensif
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik			
	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	Keterbatasan SDM	Kerjasama dengan BPS Kota Yogyakarta
Program Peningkatan Pelayanan Persandian			

	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM - Keterbatasan sarana dan prasarana - Keterbatasan plafon anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Kegiatan yang melibatkan OPD Lain - Melakukan pinjam pakai barang - Mengoptimalkan plafon anggaran yang ada
	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM - Keterbatasan sarana dan prasarana - Keterbatasan plafon anggaran - Belum memiliki standar keamanan informasi di Pemkot Yogyakarta 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Kegiatan yang melibatkan OPD Lain - Melakukan pinjam pakai barang - Mengoptimalkan plafon anggaran yang ada - Melaksanakan tahap perancangan standar keamanan informasi
	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM - Belum adanya regulasi daerah yang jelas - Keterbatasan sarana dan prasarana - Keterbatasan plafon anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Kegiatan yang melibatkan OPD Lain - Mengoptimalkan regulasi daerah yang ada walaupun dilaksanakan secara parsial - Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada - Mengoptimalkan plafon anggaran yang ada

3.3 REALISASI KEUANGAN

Berikut merupakan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Penyerapan anggaran belanja langsung Komunikasi, Informatika dan Persandian pada tahun 2018 sebesar 94,81% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program Peningkatan Komunikasi Publik pada sasaran Meningkatkan Layanan Informasi Publik Meningkat dan tercapai 98.10 %. Sedangkan pada Program Peningkatan Pelayanan Persandian pada sasaran Keamanan Informasi Meningkat mencapai 89.74%

Realisasi Anggaran 2018 ini lebih besar serapannya dibandingkan anggaran 2017 sebesar 94,18% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program Pengelolaan Informasi dan Data Statistik pada sasaran Meningkatkan Layanan Informasi Publik Meningkat dan tercapai 96.72 %. Sedangkan pada Program Peningkatan Pelayanan Persandian pada sasaran Keamanan Informasi Meningkat mencapai 95.05%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/ kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

No	Program dan Kegiatan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Relalisasi 2017	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.264.711.176	1.101.511.717	87.10	763.426.864	88.13
1.1	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat dan Konsultasi	455.802.000	377.261.529	82.77	237.722.274	95.14
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan dan Perlengkapan Kantor	719.916.776	638.169.533	88.64	389.292.018	83.47
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	88.992.400	86.080.655	96.73	136.412.572	86.41
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	220.401.871	157.467.421	71.45	167.026.763	68.83
2.1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Bangunan Kantor	85.000.000	84.425.000	99.32	94.146.450	82.02
2.2	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	135.401.871	73.042.421	53.94	72.880.313	56.99
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	54.000.000	40.590.0000	75.17	38.250.000	78.87
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas	54.000.000	40.590.0000	75.17	38.250.000	78.87

	Aparatur					
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	2.220.000	739.500	33.31	65.424.500	91.21
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	2.220.000	739.500	33.31	65.424.500	91.21
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	15.511.497.487	14.834.792.311	95.64	12.523.203.016	96
5.1	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	1.673.211.192	1.538.525.125	91.95	682.683.405	85.60
5.2	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	13.582.754.122	13.141.999.211	96.76	11.670.171.511	96.91
5.3	Pengembangan Smart City	255.532.173	154.267.975	60.37	170.348.100	83.28
6	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	1.731.944.206	1.704.588.925	98.42	1.465.133.270	96.72
6.1	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	1.731.944.206	1.704.588.925	98.42	1.465.133.270	96.72
7	Program Peningkatan Komunikasi Publik	1.478.546.030	1.450.495.930	98.10	1.263.009.000	95.15
7.1	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	1.205.051.824	1.201.824.320	99.75	856.428.500	98.17
7.1	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	273.494.206	248.671.610	90.92	405.580.500	89.34
8	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	157.281.100	140.403.000	89.27	196.646.150	94.58
8.1	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	157.281.100	140.403.000	89.27	196.646.150	94.58
9	Program Pengembangan Pelayanan Persandian	1.374.495.600	1.233.486.243	89.74	803.320.736	95.08
9.1	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	717.828.000	594.777.283	82.86	352.841.736	97.11
9.2	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	569.155.500	553.977.160	97.33	382.664.300	93.13
9.3	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	87.512.100	84.731.800	96.82	67.814.700	96.08
	Jumlah	21.795.097.470	20.664.075.047	94.81	17.285.440.299	95.14

Analisis dari masing masing kegiatan terkait dengan pencapaian kinerja anggaran di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan rapat-rapat dan Konsultasi, pencapaian 82.77% karena pada rekening belanja makan minum harian pegawai tidak terserap seluruhnya karena adanya kesalahan dalam penulisan ekspresi pada

- perubahan anggaran. Pada rekening Belanja perjalanan dinas tidak seluruhnya terserap karena kegiatan akhir tahun yang tidak sesuai prediksi.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor hanya tercapai 88.64% dikarenakan beberapa rekening tidak terserap seluruhnya karena adanya barang yang sudah tidak terdapat di pasaran (belanja alat perlengkapan rumah tangga/kantor/kerja), berkurangnya pemakaian telepon karena sudah adanya sarana komunikasi melalui media sosial WA (rekening belanja telepon), adanya surat kabar yang sudah tidak terbit (belanja surat kabar), kendaraan baru sejumlah 5 unit dimana perpanjangan STNK pada tahun 2019, diberlakukannya e office sehingga belanja cetak tidak tercapai, belanja pemeliharaan yang tidak banyak terpakai karena alat-alat yang ada pada kondisi baik/ tidak rusak.
 3. Kegiatan Penyediaan jasa pengelola Pelayanan Perkantoran, tercapai 96.73%.
 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor hanya tercapai 99.32% sesuai dengan target yang direncanakan.
 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas hanya terserap 53.94 % dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi kendaraan, banyak kendaraan yang masih berfungsi dengan baik suku cadangnya serta pada belanja bahan bakar menyesuaikan dengan kebutuhan kendaraan operasional, pemegang kendaraan tidak menservis kendaraanya, tidak mengganti suku cadang dan pelumasnya.
 6. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas hanya terserap 75.17 % karena mendapatkan harga kursus yang lebih murah dan untuk kursus singkat non PNS tidak ada jadwal kursus sesuai yang diinginkan.
 7. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD telah sesuai dengan target, capaian realisasi keuangan hanya tercapai 33.31% dikarenakan anggaran makan dan minum rapat tidak banyak terpakai karena rapat-rapat banyak dilakukan melalui diskusi di media sosial (grup WA)
 8. Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika terserap 91.95% karena personil yang akan dikontrak tidak jadi karena tidak memenuhi syarat, adanya sisa selisih lelang (menyesuaikan harga pemenang lelang) dan pada belanja modal perbaikan komputer hanya ada 6 aplikasi yang harus diperbaiki.
 9. Pengelolaan Perangkat keras dan jaringan Teknologi Informasi, tercapai 96.76% karena menyesuaikan jumlah rapat pada belanja makan minum rapat, menyesuaikan dengan kerusakan perangkat pada belanja

- pemeliharaan peralatan, serta menyesuaikan dengan harga negosiasi pada beberapa belanja modal pengadaan komputer.
10. Pengembangan Smart City realisasi anggaran hanya mencapai 60.37% karena workshop lebih banyak dilakukan dengan praktek menggunakan komputer dan gadget secara langsung sehingga belanja alat tulis kantor tidak terserap, materi digital diberikan dalam bentuk soft copy, Acara FGD disatukan dengan acara Walikota Mengapresiasi, jamuan rapat banyak disupport oleh OPD lain. Pada belanja perjalanan dinas menyesuaikan dengan kehadiran masyarakat sebagai peserta, akomodasi dan transportasi narasumber ditanggung oleh institusi narasumber.
 11. Kegiatan Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi anggaran terserap 98.42% beberapa rekening yang tidak terserap seluruhnya karena menyesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan Sekaten (21 hari), koordinasi penjurian dilakukan secara online sehingga belanja makan minum rapat tidak terserap seluruhnya serta ada belanja hadiah untuk masyarakat tidak diberikan karena tidak semua nominator sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
 12. Kehumasan dan Pelayanan Informasi jumlah anggaran yang terserap mencapai 99.73% secara umum sesuai dengan perencanaan yang ada.
 13. Kegiatan Pengelolaan Keluhan dan Aduan, realisasi anggaran hanya mencapai 90.92% hal ini dikarenakan Honor UPIK berkurang 1 orang, materi sosialisasi diberikan dalam bentuk soft copy, adanya penggabungan jadwal rapat, mengikuti jumlah kehadiran peserta (uang transport peserta), dan honor workshop narasumber PPID dari luar tidak mau menerima.
 14. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Data Statistik, realisasi anggaran mencapai 94.58% karena disebabkan 3 output buku yang batal produksi oleh BPS Kota Yogyakarta.
 15. Kegiatan Operasional Persandian dengan capaian realisasi anggaran 82.86%. Capaian 82.86% ini dikarenakan pada belanja modal pengadaan alat komunikasi sudah sesuai dengan harga pasar dan spesifikasi teknis yang direncanakan.
 16. Kegiatan Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi, capaian realisasi anggaran adalah 97.33%, anggaran yang tidak terserap karena pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan dipasang dekorasi, materi diberikan dalam bentuk soft copy, dokumentasi sudah tercukupi dengan file digital dan biaya perjalanan dinas dalam daerah menyesuaikan dengan kehadiran peserta.
 17. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika, realisasi anggaran mencapai 96.82% salah satu belanja yang tidak sesuai rencana adalah belanja penggandaan karena sudah tercukupi, belanja

dokumentasi tidak dilaksanakan karena sudah tercukupi dalam bentuk file digital dan adanya penggabungan satu moderator dalam satu acara.

Demikian analisis capaian kinerja keuangan berdasarkan Laporan Relalisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2018.

BAB IV PENUTUP

LKIP merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis kinerja pada suatu organisasi serta menggambarkan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi, informasi dan persandian serta statistik. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, untuk OPD yang baru terbentuk Laporan Ini belum bisa menyajikan pencapaian tahun-tahun sebelumnya karena dibentuk dari berbagai OPD , sehingga belum bisa melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun. Secara umum, dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada tahun 2018 adalah amat baik. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien tercermin dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang pada tahun 2018 anggaran terserap 94.81 % .

Demikian LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ini kami susun semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan Kinerja Organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta 31 Januari 2019

PLt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Yogyakarta


Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 196907231996031005

